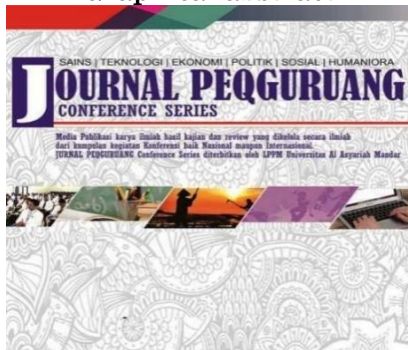


# Journal Pegguruang: Conference Series

eISSN: 2686-3472

JPCS  
Vol. 8 No. 1 MEI 2026

## Graphical abstract



## PREFERENSI POLITIK MASYARAKAT DESA PAMBUSUANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

<sup>1</sup>\*Nur Alya, <sup>2</sup> Chuduriah Sahabuddin, <sup>3</sup>Ahmad Al Yakin  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Al Asyariah Mandar

\*Corresponding author  
[nuralyaali14@gmail.com](mailto:nuralyaali14@gmail.com)

## Abstract

This study aims to understand the political preferences of the Pambusuang Village community in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Polewali Mandar Regency. This study is motivated by the importance of understanding the political behavior of the community in determining the direction and quality of local democracy, especially in villages that have diverse work backgrounds and significant levels of participation. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation. The informants in this study were residents who work as farmers, fishermen, teachers, religious leaders, traditional leaders, village officials, housewives, and youth. The results of the study show that the community's political preferences are influenced by several main factors, such as emotional ties to candidates, the vision and mission of candidate pairs, the strength of social capital, and the influence of social media and family.

**Keywords:** Political Preferences, Pilkada, Pambusuang Village, Community Participation.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami preferensi politik masyarakat Desa Pambusuang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar. Desa Pambusuang dipilih karena karakteristiknya sebagai wilayah pesisir dengan dinamika sosial-ekonomi yang kuat, di mana terjadi kontestasi antara nilai-nilai tradisional dan arus informasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Informan berjumlah 20 orang yang dipilih secara purposif untuk mewakili keragaman latar belakang profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat dipengaruhi oleh faktor multidimensional: ikatan emosional, figur tokoh lokal, efektivitas media sosial, dan program kerja. Secara longitudinal, terlihat adanya pergeseran di mana pemilih muda mulai kritis terhadap visi-misi, meskipun pengaruh tokoh agama tetap dominan bagi pemilih tradisional.

**Kata Kunci :** Preferensi Politik, Pilkada, Desa Pambusuang, Partisipasi Masyarakat.

## Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.6482

Received : 04-05-2026 / Received in revised form : 10-05-2026 / Accepted : 16-05-2026

## 1. PENDAHULUAN

Preferensi politik masyarakat dalam menyikapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat sangat beragam. Keterlibatan individu dalam partai politik juga menjadi wujud nyata dari perilaku politik, karena partai merupakan saluran resmi bagi warga negara untuk ikut ambil bagian dalam proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan publik. Pilihan politik yang diambil masyarakat dalam ajang Pilkada memegang peranan penting, sebab keberhasilan proses Pilkada turut mencerminkan keberhasilan perilaku politik pemilih.

Fokus penting dalam kajian ini adalah menelaah pengaruh strategi kampanye para calon kepala daerah, keaktifan dalam partai politik, serta dinamika pemberian suara dalam pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Sumendap (2022), persaingan partai dalam merebut suara publik bisa dianalogikan dengan proses pemasaran produk kepada konsumen. Dalam konteks ini, pemilih merupakan "target pasar", yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yakni pemilih ideologis, pemilih tradisional, pemilih rasional (yang terdiri dari kalangan intelektual dan non-partisan), serta pemilih yang belum memiliki pilihan tetap (*swing voters*).

Seiring meningkatnya kualitas pelaksanaan Pilkada, kesadaran politik masyarakat pun turut mengalami perkembangan. Banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan preferensi politik individu maupun kelompok, mulai dari latar belakang sosial hingga pengaruh media dan proses sosialisasi politik yang mereka alami.

Ciri utama negara demokratis adalah penempatan kedaulatan pada rakyat. Hal ini tercermin dalam prinsip "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", yang menegaskan bahwa pemerintahan harus lahir dari kehendak masyarakat. Sistem pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi yang bertujuan menyaring figur-figur terbaik untuk memegang jabatan publik, baik legislatif maupun eksekutif (Sabrina & Saad, 2001).

Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin prinsip demokrasi melalui Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Selain itu, Pasal 22E ayat (1) menegaskan bahwa pemilu harus diselenggarakan setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil—yang menunjukkan bahwa partisipasi rakyat dilindungi secara hukum.

Selain pemilu nasional, Pilkada merupakan sarana penting lainnya dalam mengaktualisasikan kedaulatan rakyat. Pilkada memberi ruang bagi warga untuk memilih langsung kepala daerahnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan secara demokratis oleh rakyat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memperjelas bahwa Kepala Daerah dan Wakilnya dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh masyarakat di daerah tersebut.

Pilkada bertujuan menciptakan pemimpin daerah yang benar-benar mewakili kehendak rakyat. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi proses elektoral, tetapi juga menjadi mekanisme untuk memperoleh legitimasi kekuasaan. Dalam pelaksanaannya, sistem Pilkada langsung memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk menyalurkan hak politik mereka.

Kendati sudah ada kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan Pilkada secara rinci, berbagai tantangan teknis dan administratif masih sering ditemukan di lapangan. Seperti yang diungkapkan Dila Farhani dari JPPR, terdapat sejumlah permasalahan, mulai dari distribusi logistik yang kurang tepat, hingga praktik politik uang yang mencoreng prinsip demokrasi. Contohnya, keberadaan TPS yang ditempatkan dekat dengan tempat ibadah atau posko pemenangan kandidat tertentu, sebagaimana terjadi di beberapa wilayah seperti Jakarta Timur, Makassar, Ternate, dan daerah lainnya, dinilai bisa mengganggu netralitas proses pemungutan suara.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat penting. Bawaslu dituntut untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, baik dalam kesiapan teknis maupun dalam menjamin netralitas pelaksanaan Pilkada. Pemanfaatan teknologi pemantauan secara real-time dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini, agar pemilu berjalan secara jujur, adil, dan akuntabel.

Meski berbagai tantangan masih ditemukan, masyarakat tetap mendapatkan manfaat besar dari pelaksanaan Pilkada langsung. Salah satu keuntungan utamanya adalah adanya kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Artinya, pemilih bisa memilih kandidat berdasarkan pemahaman dan preferensi politik mereka sendiri.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pilihan politik pemilih adalah bagaimana calon kepala daerah membangun citra mereka di hadapan publik. Fenomena selebritisasi politik—sebagaimana dijelaskan oleh Al Yakin dan Agustang (2020)—sering digunakan sebagai strategi untuk menarik simpati pemilih. Namun, strategi ini juga berpotensi menggeser fokus pemilih dari kualitas kandidat ke aspek popularitas semata, yang pada akhirnya dapat menurunkan mutu demokrasi. Oleh karena itu, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat vital dalam menyediakan informasi yang objektif dan edukatif kepada masyarakat, agar pemilih dapat membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional.

Dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, preferensi politik di Desa Pambusuang menunjukkan pola yang semakin kompleks. Jika pada pemilu-pemilu sebelumnya loyalitas terhadap "pilihan tokoh adat" bersifat mutlak, pada tahun 2024 muncul fenomena *split-ticket voting* sederhana di mana pemilih memisahkan kedekatan emosional dengan kebutuhan akan program kerja nyata, seperti bantuan infrastruktur perikanan. Persaingan partai dalam merebut suara rakyat saat ini dapat dianalogikan sebagai pemasaran produk, di mana

pemilih dikategorikan menjadi pemilih ideologis, tradisional, rasional, dan *swing voters*

Pilkada serentak pada 27 November 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Barat, dilaksanakan di enam kabupaten, salah satunya Kabupaten Polewali Mandar yang mencakup 173 desa, 16 kecamatan, dan 23 kelurahan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten, pasangan calon nomor urut 1, Syamsul Mahmud dan Hj. Nursami MP (Assami), berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara tertinggi, yakni 111.590 suara. Meskipun seluruh kandidat memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, keberhasilan pasangan pemenang sangat ditentukan oleh efektivitas strategi kampanye mereka dalam mempengaruhi preferensi pemilih yang memenuhi syarat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang berorientasi pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dan politik yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Desa Pambusuang. Tujuan utama pendekatan ini adalah memperoleh pemahaman kontekstual terkait bagaimana individu maupun kelompok masyarakat membentuk dan mengekspresikan preferensi politik mereka.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang informan, melalui interaksi langsung dan pengamatan terhadap aktivitas serta narasi politik yang berkembang. Penelitian ini tidak berfokus pada angka, melainkan pada makna, pengalaman, dan interpretasi sosial yang dituturkan oleh para pelaku politik di tingkat akar rumput.

Penelitian dilaksanakan di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, yang menjadi salah satu wilayah dengan intensitas politik yang cukup tinggi pada Pilkada 2024. Proses pengumpulan data berlangsung selama bulan Mei hingga Juni 2025, bertepatan dengan masa pasca-pemilihan, untuk menangkap persepsi dan refleksi masyarakat terhadap proses demokrasi lokal yang baru saja berlangsung.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan relevansi informasi yang dimiliki. Sebanyak 20 orang informan diikutsertakan, terdiri atas tokoh agama, tokoh pemuda, ibu rumah tangga, nelayan, dan aparat desa. Masing-masing informan merepresentasikan segmen sosial yang memiliki pengaruh atau keterlibatan dalam proses pemilihan kepala daerah.

Data yang dikumpulkan bersumber dari interaksi verbal (wawancara), pengamatan langsung (observasi), dan dokumen (arsip dan media visual) yang berhubungan dengan aktivitas politik warga dan pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut.

Beberapa tahap yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu.

Pada tahap awal, peneliti merumuskan fokus permasalahan, menentukan lokasi penelitian, memilih

informan, serta menyusun pedoman wawancara dan instrumen observasi. Langkah ini bertujuan agar proses pengumpulan data berjalan terarah dan sesuai tujuan penelitian.

Pelaksanaan Pengumpulan Data Tahap ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara mendalam terhadap informan, mengamati aktivitas masyarakat, serta mendokumentasikan peristiwa-peristiwa politik lokal yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan humanis dan partisipatif, guna menciptakan kenyamanan dan keterbukaan dalam proses interaksi.

Analisis dan Kategorisasi Data Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses reduksi data, yakni menyaring informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tersisa kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema pokok, seperti pengaruh tokoh lokal, citra kandidat, media sosial, dan praktik politik uang. Refleksi dan Penarikan Kesimpulan Tahap akhir mencakup penelaahan terhadap keterkaitan antar temuan, penyusunan interpretasi, serta penarikan makna atas preferensi politik masyarakat. Refleksi dilakukan secara holistik untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan merepresentasikan realitas sosial secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa jenis instrumen:

- Pedoman Wawancara Terbuka, disusun untuk menggali informasi dari informan mengenai pengalaman, alasan memilih kandidat, serta persepsi mereka terhadap dinamika politik lokal. Lembar Observasi, digunakan untuk mencatat aktivitas politik warga, baik secara langsung di lingkungan sosial maupun melalui interaksi digital di media sosial. Dokumentasi, berupa pengumpulan materi visual, catatan, arsip, dan tangkapan layar terkait kegiatan kampanye, perolehan suara, serta bentuk sosialisasi politik lainnya.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari data. Peneliti menggunakan langkah-langkah analisis berikut:

1. Reduksi Data: Penyaringan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Kategorisasi: Pengelompokan data ke dalam tema seperti alasan memilih, pengaruh media, hubungan emosional dengan kandidat, dll.
3. Penyajian Naratif: Menyusun data secara deskriptif dalam bentuk cerita yang menggambarkan dinamika preferensi politik masyarakat.
4. Verifikasi dan Penarikan Simpulan: Proses validasi dan refleksi atas seluruh temuan, yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan utama penelitian.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara menyilang guna memastikan kebenaran informasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa preferensi politik masyarakat Desa Pambusuang dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional:

1. Kedekatan Emosional dan Budaya Masyarakat cenderung memilih calon yang memiliki hubungan emosional atau kultural dengan warga setempat. Nilai-nilai kekeluargaan, keagamaan, dan adat memainkan peran besar dalam mempengaruhi keputusan memilih.
2. Pengaruh Tokoh Lokal dan Agama Figur tokoh agama dan tokoh adat memiliki pengaruh signifikan terhadap arah pilihan politik masyarakat. Rekomendasi dan sikap politik mereka cenderung dijadikan acuan oleh komunitas, khususnya kelompok ibu rumah tangga dan lansia.
3. Media Sosial sebagai Sumber Informasi Politik Media sosial menjadi saluran utama informasi politik, terutama di kalangan pemuda. Namun, terdapat kerentanan terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan sentimen emosional yang memperkuat polarisasi.
4. Program Kerja dan Janji Politik Masyarakat mulai menunjukkan kecenderungan untuk memilih berdasarkan program kerja yang ditawarkan, terutama terkait isu pendidikan, bantuan nelayan, dan pembangunan infrastruktur.
5. Politik Uang Meskipun sebagian besar masyarakat menyadari bahwa politik uang melanggar etika demokrasi, praktik ini masih terjadi dan berpengaruh terhadap keputusan memilih, terutama di kalangan ekonomi lemah.
6. Tingkat Pendidikan Warga dengan pendidikan menengah ke atas cenderung lebih kritis dalam mengevaluasi calon berdasarkan rekam jejak dan visi-misi, dibanding mereka yang hanya mengandalkan popularitas atau kedekatan emosional.
7. Netralitas Aparat dan TPS Terdapat temuan terkait penempatan TPS yang dekat dengan posko salah satu kandidat, yang dinilai memengaruhi persepsi netralitas pemilihan. Meskipun tidak ditemukan pelanggaran langsung, hal ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih lanjut.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor rasional semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Hal ini mencerminkan bahwa politik lokal masih sangat terikat dengan hubungan personal dan sosial yang kuat di tingkat akar rumput.

### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan pilihan politik masyarakat Desa Pambusuang dalam Pilkada 2024 tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional semata, melainkan juga dipengaruhi oleh

berbagai aspek sosial, budaya, dan emosional. Faktor-faktor seperti kedekatan kekerabatan dengan calon, pengaruh tokoh agama dan tokoh masyarakat, strategi kampanye yang dilakukan kandidat, serta kekuatan media sosial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah dukungan masyarakat. Meskipun sebagian warga mulai menunjukkan kecenderungan untuk memilih berdasarkan program kerja dan visi misi, praktik politik uang serta pengaruh lingkungan sosial masih menjadi determinan kuat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa preferensi politik masyarakat setempat merupakan cerminan dari relasi interpersonal, identitas komunal, serta tingkat literasi politik yang masih beragam. Oleh karena itu, keberhasilan dalam membentuk pilihan politik masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemampuan kandidat dalam menjalin kedekatan sosial, membangun citra positif, dan menghadirkan tawaran program yang menyentuh kebutuhan nyata warga.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al Yakin, A., & Agustang, A. (2020). *Selebritisasi politik dan perubahan preferensi pemilih di era digital*. Universitas Negeri Makassar.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2022). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Farhani, D. (2024). *Laporan pemantauan pemilu oleh JPPR*. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muhtadi, B. (2021). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan.
- Nora, E., & Pradasmara, P. A. (2023). Digital Campaign and Youth Political Participation in Local Elections. *Journal of Local Government Issues*, 6(1), 45-60.
- Sabrina, F., & Saad, M. (2001). *Demokrasi dan pemilu di Indonesia: Studi atas implementasi prinsip-prinsip demokrasi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Sari, I. P., dkk. (2024). The Role of Religious Leaders in Shaping Political Preferences in Rural Communities. *International Journal of Politics and Sociology*, 12(2), 112-128.
- Sumendap, R. (2022). *Pemasaran politik dalam dinamika Pilkada*. Deepublish.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun  
2004 tentang Pemerintahan Daerah.